

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan yang berkembang dengan pesat adalah modern yang terdiri dari hypermarket, supermarket, supermall, dan minimarket. Diantara pasar modern tersebut, minimarket merupakan bentuk ritel yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Kabupaten Sidoarjo jumlah minimarket ini pun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tujuh tahun terakhir (2008-2014) jumlahnya mencapai 214 buah. Jumlah terbanyak terdapat di daerah yang memang strategis. Di Sidoarjo keberadaan minimarket ini telah memasuki desa-desa dan perkampungan. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pedagang kecil dan pasar tradisional. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 pemerintah ingin menata keberadaan pasar modern ini, begitu pula dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 yang menjadi penjelas dari Peraturan Presiden tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya dirasakan kurang efektif karena ketiga kebijakan tersebut bersifat luas. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan dengan adanya peraturan ini akan menjadi semakin jelas dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan minimarket dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara *Snowball* yang kemudian dilanjutkan dengan teknik penentuan informan secara *Purposive Sampling*. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

Hasil temuan data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo seluruh prosedurnya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor sumberdaya staf dalam kondisi yang tidak memadai pada pelaksana di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sehingga kondisi tersebut menghambat implementasi kebijakan ini. adapun faktor lain yakni adanya kepentingan yang dipengaruhi adanya kebijakan, pada faktor ini Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM kurang memiliki kekuatan dalam menjalankan pengawasan dikarenakan ada kepentingan dari aktor di luar pemerintahan.

Kata Kunci : *Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Kebikajakan Penataan Minimarket, Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket*

ABSTRACT

Trading activity is a fast growing modern consisting of hypermarkets, supermarkets, supermall, and minimarket. Among the modern market, minimarket is a form of retail which has developed very rapidly. In Sidoarjo this minimarket number continues to increase every year, the last seven years (2008-2014) amounted to 214 units. The greatest number are in areas that are strategic. In Sidoarjo existence of this minimarket has entered the villages and settlements. It causes damage to the small traders and traditional markets. Therefore, through Presidential Decree No. 112 of 2007 the government wanted to organize this modern market presence, as well as the Minister of Trade Regulation No. 53 of 2008 and the East Java Provincial Regulation No. 3 of 2008 which is explanatory of the Presidential Decree. However, in practice felt less effective because these policies are broad. Therefore, Sidoarjo regency government in 2011 issued a legal product in the form of Regulation No. 20 Sidoarjo Regent in 2011 about Structuring Minimarket in Sidoarjo, is expected with this regulation will become increasingly evident in practice.

This study was conducted to describe the arrangement of policy implementation minimarket and also the factors that affect the implementation process. To answer the problem of research used qualitative research methods with descriptive type. Data collected by interview, observation and documentation. Mechanical determination informants Snowball. While technical examination of the validity of data through triangulation of data sources so that the data presented is valid data.

The findings of the data showed that the implementation of planning policies minimarket in Sidoarjo entire procedure has been carried out properly. As for the staff resources factor in conditions that are inadequate to the executive in the Department of Trade and Cooperatives Peri ndustrian EMR Sidoarjo district so that the conditions inhibiting the implementation of this policy. As for other factors that influenced the interest of policy, on this factor Cooperative Department of Industry, Trade and Energy and Mineral Resources have less power in carrying out supervision because there is interest from actors outside the government.

Keywords: *Public Policy, Implementation of Public Policy, Policy-Setup will Minimarket, Implementation Planning Policy Minimarket*

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT karena dengan Rahmat dan Ridho-NYA sehingga penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET (Studi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo)” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah adalah ujung tombak lahirnya berbagai peraturan di Indonesia baik peraturan pusat maupun daerah. Begitu pula dengan lahirnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang cukup pesat, terutama dalam bidang perdagangan. Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi di Sidoarjo. Salah satu indikatornya adalah mulai banyaknya toko-toko modern seperti Hypermart, Supermarket, Minimarket, dan Mall-Mall yang berdiri di Sidoarjo, terutama minimarket yang mengalami pertumbuhan sangat pesat bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa di Kabupaten Sidoarjo.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merasa perlu untuk membuat sebuah kebijakan untuk melindungi pasar tradisional dan pedagang kelontong/kecil dan UMKM agar tidak sampai merugikan atau bahkan gulung tikar akibat menjamurnya minimarket di Kabupaten Sidoarjo ini. Melalui Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo serta SKPD terkait Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin menata keberadaan minimarket ini agar sesuai dengan peraturan/kebijakan yang telah ditentukan yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 tahun 2011.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi

kebijakan tersebut.

Peneliti menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis menerima segala masukan bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan masukan bagi para pelaksana Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, Amin.



Surabaya, 18 Juni 2014

Aulia Rachman